MANAJEMEN UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA DI DESA LELATO KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

ARTIKEL JURNAL

MOHAMAD KIFLI PIANUS
NIM: D02420036

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

Dipindai dengan CamScanner

MANAJEMEN UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA DI DESA LELATO KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Mohamad Kifli Pianus[1], Srihandayani Suprapto[2], Franky Djafar[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

MOHAMAD KIFLI PIANUS. Management of Village Owned Enterprise Business Units on the Village economy in Leato Village, Sumalat District, North Gorontalo Regency. Supervised by Dr. Srihandayani Suprapto, SE. M.Si as Supervisor I and Dr. Franky Djafar, S.Pd, M.Si as Supervisor II.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research state that the BUMDes business units in Lelato Village Sumalata District has contributed to improving the community's economy. This was obtained through capital participation for the establishment of agricultural Kiosk which makes it easier for the community to find agricultural materials, and the supply of BUMDes income to Village Original Income (PADesa). Apart from these various benefits, BUMDes in Lelato Village facing several obstacles, namely the lack of capital owned by BUMDes, the lack of human resource capacity in managing BUMDes, the lack of public knowledge about BUMDes and the lack of community participation in advancing BUMDes business units.

Keywords : Management, Village-Owned Enterprises, Improving the Village Community Economy

ABSTRAK

MOHAMAD KIFLI PIANUS. Manajemen Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Terhadap Perekonomian Desa Di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Dibimbing Dr. Srihandayani Suprapto SE, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Franky Djafar S.Pd, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa unit usaha BUMDes di Desa Lelato Kecamatan Suamlata telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diperoleh melalui adanya penyertaan modal untuk pendirian KIOS pertanian yang memudahkan masyarakat dalam mencari bahan-bahan pertanian, dan suplai pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Lelato menghadapi beberapa kendala, yakni kurangnya modal yang dimiliki BUMDes, minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepenggurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha BUMDes

Kata Kunci : Manajemen, Badan Usaha Milik Desa, Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa

Dipindai dengan CamScanner

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan memabangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa (Undang-undang No.6 2014 Tentang Desa).

Salah satunya Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri ruang lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam

Dipindai dengan CamScanner

pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes.

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahtetraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang adil dan seimbang, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari tingkat desa sehingga desa tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Pusat, Dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi atau terobosan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ialah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Bumdes atau badan usaha milik desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun informasi terkait dengan program BUMDes yang ada di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, BUMDes di desa lelato bernama BUMDes Lelato Mandiri, dengan jumlah anggaran yang di dapatkan itu sejumlah Rp. 55.000.000. Dimana jumlah tersebut di bagi ke dalam 2 unit usaha yakni Rp. 12.250.000 untuk unit usaha pengadaan kursi dan tenda dan Rp. 42.750.000 untuk unit usaha toko

Dipindai dengan CamScanner

pertanian. Berikut adalah tabel program BUMDes Lelato Mandiri. **Sumber: BUMDes Lelato Mandiri, 2023.**

Sejalan dengan penjelasan di atas sesuai Konsep evaluasi program menurut Riant Nugroho (2014) adalah penilaian terhadap pencapaian variasi dalam indikatorindikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tugas. Selain itu indikator evaluasi program menurut Winarno (2016) ada lima yaitu sasaran kebijakan, diluar kebijakan, kondisi, pembiayaan langsung dan tidak langsung. Adapun masalah yang perlu di evaluasi pada Program Badan Usaha Milik Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara adalahkurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pengembangan dana BUMDes, karena mandeknya setoran masyarakat berkenaan dengan pengambilan di Toko Pertanian BUMDes.Selain itu, masalah lain yang ada di BUMDes Lelato Mandiri adalah kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

Adapun program yang dicanangkan dan belum maksimal adalah penjualan bahan pokok dan depot air isi ulang.Dan yang masih berjalan saat ini hanyalah program usaha depot air isi ulang tersebut. Dengan permasalah catatan keuangannya yang sampai saat ini kurang di *manage*, Jadi hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan Apa Faktor-faktor yang mempengaruhipelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa tersebut.

Sesuai dengan fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program-Program Badan Usaha Milik Desa Terhadap Perekonomian Desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemui peneliti dilokasi penelitian maka penelitian ini

Dipindai dengan CamScanner

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. menurut Sugiyono (2018) Metode deskriptif dengan analisa kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisa dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang manajemen unit Usaha BUMDes di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, apakah sudah optimal atau belum.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian adalah menurut Henry Fayol Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Henry Fayol (Tanjung, hal. 76) dalam bukunya mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pengelolaan, yaitu terdiri dari :

1) Perencanaan *(Planning)*
2) Pengorganisasian *(Organizing)*
3) Pengarahan *(Commanding)*
4) Pengkoordinasian *(Coordinating)*
5) Pengendalian *(Controlling)*

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian/ pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui data hasil yang berhubungan dengan hasil observasi yang meliputi data-data yang mendukung data primer.

Data dalam penelitian kualitatif deskriptif, diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai titik jenuh, Sugiyono, (dalam Viedy, 2013:52). Sedangkan triangulasi sendiri, menurut Moleong (dalam Viedy, 2013:52) memiliki pengertian suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observsi, wawancara dan informasi lainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang ditelitiDalam penelitian ini banyak data diperoleh terlebih dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara tersebut itulah dapat diperoleh data tentang pengelolaan penyediaan air

Dipindai dengan CamScanner

bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bone Bolango.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan pada teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Henry Fayol (Tanjung, hal. 76) dalam bukunya mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pengelolaan berikut penjelasan masing-masing indikator tersebut.

1. Perencanaan *(Planning)*

Fungsi Perencanaan. Menurut Siagian (2012) perencanaan dapat didefinisikan "sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan". Menurut Kunarjo (dalam Suhadak dan Nugroho (2014:2) bahwa "perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu."

Suatu perencanaan yang ingin melibatkan kepentingan masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan di bawah permukaan dan menggalinya secara seksama, serta merumuskannya dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan, artinya menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi dan mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi.

Hasil penelitian bahwa indikato perencanaan merupakan proses awal dalam membuat sebuah program tentunya dengan memperhatikan bagaimana capaian sebuah program tersebut sesuai dengan harapan yang diingkinkan. Sama halnya dengan tujuan pendirian BUMDes Mandiri Desa Lelato adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat dan proses pengembangan BUMDes agar menjadi komponen pendapatan asli desa sehingga menjadikan Desa Lelato lebih mandiri terutama pada persoalan keuangan desa.

2. Pengorganisasian *(Organizing)*

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama

Dipindai dengan CamScanner

lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 119) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Hasil penelitian menyatakan terkait indikator pengorganisasin menunjukan bahwa dalam realisai program BUMDes Mandiri Lelato masih membutuhkan perhatian yang cukup signifikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. sebuah organisasi apabila merealisasikan program-program yang telah direncanakan tentu perlu stuktur atau bagian-bagian yang saling terikat hubungannya sehingga menghasilkan realisasi program yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta dapat berjalan secara efektif sesuai porsinya masing-masing. Hal ini tentu masih diperlukan oleh BUMDes Mandiri. Sehingga kedepan perlu peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan pengembangan BUMDes Mandiri Lelato tersebut.

3. Pengarahan *(Commanding)*

Fungsi pengarahan (commanding) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit,rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip pengarahan (Syamsi, 1994 : 124) ditujukan pada keterpaduan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasinya, keterpaduan antara tujuan kelompok dan tujuan

Dipindai dengan CamScanner

organisasinya, kerjasama antar pimpinan, partisispasi dalam pembuatan keputusan, terjalinnya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif dan efisien. Definisi fungsi pengarahan secara sederhana (Handoko, 2001 : 25) adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan.

Menurut Henry Fayol (Tanjung, 1999 : 81) mengemukakan bahwa pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia sebagai pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 :183) pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Peneliti menyimpulkan bahwa fungsi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan di dalam suatu organisasi untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksananakan suatu kegiatan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengarahan ada pada pengembangan BUMDes Mandiri. Hal ini terlihat pada peran pemerintah desa yang mengadakan penyertaan modal BUMDes melalui rapat pembahasan APBDes Desa lelato. Penyertaan modal ini dilakukan untuk pengembangan BUMDes sebagai unit usaha desa dalam menimgkatkan perekonomian masyarakat desa Lelato.

4. Pengkoordinasian *(Coordinating)*

Menurut E.F.L Brech (Hasibuan, 2009 : 85) pengkoordinasian adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Henry Fayol (Tanjung, 1999 : 87) mengatakan bahwa mengoordinasi berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang baik dapat dilakukan jika masing-masing individu menyadari dan memahami akan tugas-tugas mereka. Mereka harus mengetahui bahwa sebenarnya tugas mereka sangat

Dipindai dengan CamScanner

membantu pada usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Berkaitan dengan indikator pengorganisasian maka hasil penelitian menyatakan bahwa koordinasi sangat diperlukan pada setiap organisasi. Fungsi koordinasi ini sangat berperan juga dari proses perencanaan sampai tahap akhir pelaprannya. BUMDes Mandiri Lelato selalu berkoodinasi dengan pemerintah desa dan pendamping desa terhadap realisasi program. Tidak hanya sampai disitu, pada penyelesaian masalah juga pemerintah desa ikut terlibat karena keuangan BUMDes sumbernya dari dana desa. Hal yang paling sering dilakukan pengurus BUMDes adalah berkoordinasi terkait penyertaan modal BUMDes dan Pelaporannya.

5. **Pengendalian *(Controlling)***

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Harold Koontz (Hasibuan, 2009 : 241-242) pengendalian artinya pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Sedangkan Earl P. Strong (Hasibuan, 2009 : 241) mengatakan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan rencana.

Desa Lelato Kecamatan Sumalata memiliki BUMDes yang dikelola oleh seorang Ketua BUMDes dan beberapa anggotanya. Pendirian BUMDes di Desa Lelato diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat perdesaan, namun sebagai sebuah wadah perkumpulan masyarakat Desa, masih ditemui beberapa permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya kinerja BUMDes. Tersendatnya jalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut oleh pihak pengelola mengambil kebijakan terkait pengelolaan di antaranya memperketat membuat prosedur pengelolaan dan manejemen yang baik, bagi masyarakat yang di libatkan dalam program Badan Usaha Milik desa, maka pengelola Badan Usaha Milik Desa akan membuat program yang di betuk sosialisasi pendampingan dan pengawasan usaha bagi masyarakat. Kendatipun telah dilakukan beberapa kebijakan bahkan hingga saat ini sistem manajemen pengelolaan Badan

Dipindai dengan CamScanner

Usaha Milik Desa di Desa Lelato masih kurang baik dalam pengelolaan, kerap menghadapi permasalahan.

BUMDes Mandiri Lelato perlu dilakukan evaluasi hal ini berkaitan dengan peningkatan kinerja BUMDes agar lebih baik ke depannya sehingga tujuan menjadikan desa mandiri melalui BUMDes dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terkait indikator terakhir dari manajemen yaitu pengendalian dapat disimpulkan bahwa proses realisasi program BUMDes Mandiri Lelato tidak terlepas dari fungsi controlling dimana fungsi ini melihat apakah program BUMDes telah berjalan sesuai capaian yang diinginkan serta ada evaluasi didalamnya untuk perbaikan program kedepannya. Dari hasil wawancara bahwa realisasi program memang telah berjalan sesuai perencanaan, namun ditengah realisasi program pengurus BUMDes mengalami kendala terkait pengembalian modal BUMDes yang terhambat akibat mandeknya setoran masyarakat yang sudah membeli bahan-bahan pertanian di KIOS Pertanian milik BUMDes Mandiri Lelato. Hal ini perlu evalusi agar ke depannya tidak akan terhambat dengan persolan ini. Selain itu juga yang paling urgen adalah peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, hal ini perlu dilakukan karena melihat sumber daya pengurus belum bisa mengimbangi tugas BUMDes sebagai pengelola usaha desa melalui dana desa.

BUMDes salah satu badan usaha desa yang penyertaan modalnya melalui dana desa. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan BUMDes harus berdasarkan kebijakan yang berlaku terutam apda proses pelaporan yang menjadi hal paling utama dilakukan. Hal ini masih menajdi tugas besar pengurus BUMDes Mandiri Lelato. Sejauh ini pelaporan keuangan BUMDes yang belum sepenuhnya maksimal menjadi salah satu kendala BUMDes untuk mendapatkan penyertaan modal kembali dari pemerintah desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni unit usaha BUMDes di Desa Lelato Kecamatan Suamlata telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diperoleh melalui adanya penyertaan modal sebasar Rp. 55.000.000 untuk pendirian KIOS pertanian yang memudahkan masyarakat dalam mencari bahan-bahan pertanian, dan suplai

Dipindai dengan CamScanner

pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Lelato menghadapi beberapa kendala, yakni kurangnya modal yang dimiliki BUMDes, minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepenggurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha BUMDes.

Saran

1. Desa Lelato harus memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes, selayaknya pemerintah memberikan dukungan kepada BUMDes dalam bentuk materil maupun non materil.
2. Diharapkan kepada BUMDES untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat untuk itu penyertaan modal BUMDes harusnya mencukupi jumlah amsyarakat yang membutuhkan
3. Masyarakat hendaknya berkontribusi langsung penggunaan dan pengelolaan unit usaha BUMDes yang sedang berlangsung.
4. Diharapkan kepada masyarakat memanfaatkan BUMDES secara maksimal dengan memperhatikan ketentuan yang dibuat antara pengurus BUMDes dengan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ansari. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1: 26-31.

Budiono. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedung primpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda, Vol.4. No.1.

Deliarnov. (2009). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Perss

Mustafa. (2014). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran

Dipindai dengan CamScanner

Badan Usaha Milik Desa. Pasal 17 dan 18

Undang-undang No. 6 2014 Tentang Desa

Ridwan. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440.

Sidik. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 19 (2), 115-131.

Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Surya. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dipindai dengan CamScanner